

Program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kesiapsiagaan Bencana

Susilastuti¹ Syamsul Maarif² Kusuma³ Anwar Kurniadi⁴

Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
Republik Indonesia, Indonesia^{1,2,3,4}
Email: susilastuti.sussi@gmail.com¹

Abstrak

Indonesia yakni negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang amat besar, sehingga penguatan kapasitas masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ketangguhan komunitas. Pemerintah telah meluncurkan program Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai strategi nasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan, pengorganisasian kelembagaan lokal, dan kolaborasi multipihak. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan komunitas dalam implementasi Destana di Indonesia. Penelitian mempergunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur serta analisis dokumen kebijakan nasional, standar nasional, publikasi ilmiah, serta laporan lembaga internasional. Hasil kajian menunjukkan Destana berperan penting sebagai model pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan terstandar, didukung oleh kebijakan nasional dan Standar Nasional Indonesia (SNI) Desa Tangguh Bencana. Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan kebijakan nasional menjadi faktor utama keberlanjutan program. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan komunitas sebagai dasar kebijakan ketangguhan desa di Indonesia.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Destana, Kesiapsiagaan Bencana, Ketangguhan Komunitas

Abstract

Indonesia is recognized as a country with a significantly high level of disaster vulnerability, making the strengthening of community capacity a key element in building community resilience. The government has launched the Destana as a national strategy to enhance preparedness through community empowerment, local institutional organization, and multi-stakeholder collaboration. This article aims to analyze the concepts of community empowerment and community preparedness within the implementation framework of Destana in Indonesia. The study employs a qualitative descriptive approach through literature reviews and document analysis of national policies, national standards, academic publications, and international institutional reports. The findings indicate that Destana plays a crucial role as a structured and standardized model of community empowerment, supported by national policies and the Indonesian National Standard (SNI) for Disaster Resilient Villages. Synergy between communities, local governments, and national policies emerges as a key factor in ensuring program sustainability. These findings offer a conceptual contribution to strengthening the relationship between community empowerment and community preparedness as the foundation for village resilience policies in Indonesia.

Keywords: Community Empowerment, Destana, Disaster Preparedness, Community Resilience



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Posisi geografis Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dan berada dalam kawasan Cincin Api Pasifik menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap berbagai bencana. Negara ini menghadapi beragam ancaman mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, hingga banjir, longsor, dan kekeringan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan lebih dari 3.000 kejadian bencana terjadi

setiap tahun, berdampak pada jutaan penduduk dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Berdasarkan data *inaRISK* BNPB, terdapat lebih dari 53.000 desa/kelurahan yang berada di wilayah rawan bencana, dengan jumlah keluarga terdampak mencapai lebih dari 51 juta keluarga. Risiko tersebut mencakup berbagai jenis ancaman, antara lain gempa bumi (45.973 desa), banjir (47.430 desa), tanah longsor (34.716 desa), kekeringan (41.236 desa), serta kebakaran hutan dan lahan (37.497 desa). Selain itu, terdapat 5.744 desa yang berisiko tsunami dan 2.160 desa yang berada di kawasan rawan letusan gunung api (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, n.d.). Skala risiko yang begitu besar ini semakin diperparah oleh kesenjangan sosial-ekonomi dan dampak perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi kejadian ekstrem. Kompleksitas tersebut menuntut strategi pengurangan risiko yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan partisipatif melalui pendekatan berbasis komunitas (Shaw, 2014; Twigg, 2015; IFRC, 2018).

Perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menandai pergeseran fokus dari respons pascabencana ke arah pengurangan risiko secara preventif. Sejalan dengan kebijakan tersebut, BNPB pada tahun 2012 menginisiasi Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) sebagai strategi nasional untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Program ini menjadi wujud nyata pelibatan komunitas sebagai aktor utama dalam pengurangan risiko bencana, sejalan dengan prinsip *community-based disaster risk reduction* yang menekankan partisipasi aktif dan kemandirian masyarakat. Secara konseptual, Destana merupakan komunitas lokal yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, merespons, dan pulih secara mandiri dari dampak bencana (Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, 2025). Program ini dirancang untuk menempatkan masyarakat sebagai pusat pengelolaan risiko melalui pengorganisasian komunitas, penguatan kelembagaan lokal, peningkatan kapasitas pengetahuan, serta perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8357:2024 tentang Desa Tangguh Bencana memperkuat kerangka ini dengan menegaskan bahwa prinsip dasar Destana adalah pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam menghadapi risiko bencana (BSN, 2024). Pendekatan ini menekankan inklusivitas dan integrasi berbagai aspek, seperti adaptasi perubahan iklim, ketahanan ekonomi, keberlanjutan mata pencaharian, kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan perlindungan sosial. Implementasinya disesuaikan dengan kondisi dan prioritas lokal, sehingga sejalan dengan program pembangunan sektoral di tingkat desa. Melalui pendekatan berbasis kesejahteraan dan pembangunan, penguatan ketangguhan komunitas tidak hanya meningkatkan daya adaptasi terhadap bencana, tetapi juga menjawab akar kerentanan sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam satu dekade terakhir, sejumlah penelitian telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai implementasi Destana di Indonesia. Pratiwi dan Meirinawati (2019) meneliti partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Destana di Jawa Timur. Oktari dkk. (2018, 2020) menyoroti pentingnya pendekatan partisipatif dalam peningkatan kesiapsiagaan tsunami di Aceh melalui kolaborasi antara sekolah dan komunitas. Wahyunengseh dan Pamungkas (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam Destana mempercepat proses evakuasi dan pengelolaan sumber daya saat bencana terjadi, sementara Salman (2023) menemukan bahwa peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat melalui Destana secara signifikan memperkuat kemandirian komunitas di Lombok Utara. Dari sisi kebijakan, Djalante dkk. (2017) mengkaji kemajuan dan tantangan tata kelola penanggulangan bencana, termasuk peran desentralisasi dalam memperkuat kapasitas lokal. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, sebagian besar studi masih berfokus pada kasus lokal dengan pendekatan deskriptif. Kajian yang secara konseptual mengaitkan teori

pemberdayaan masyarakat dengan kerangka Destana di tingkat nasional masih terbatas. Selain itu, literatur belum banyak membahas bagaimana standar nasional seperti SNI 8357:2024 diterjemahkan ke dalam mekanisme pemberdayaan masyarakat yang operasional dan terukur. Kesenjangan ini cukup signifikan mengingat pemberdayaan masyarakat yang terstruktur merupakan fondasi ketangguhan komunitas jangka panjang (Gaillard & Mercer, 2012; Kusumasari & Alam, 2012; UNDP, 2025). Lebih jauh lagi, analisis tentang keberlanjutan kelembagaan dan pola kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan Destana masih minim, padahal aspek ini sangat penting untuk memastikan efektivitas program dalam jangka panjang. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara sistematis konsep pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan komunitas dalam kerangka implementasi Destana secara nasional di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengaitkan kerangka teoritis pemberdayaan masyarakat dengan kebijakan nasional dan praktik lokal, sehingga dapat memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis bagi penguatan kebijakan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.

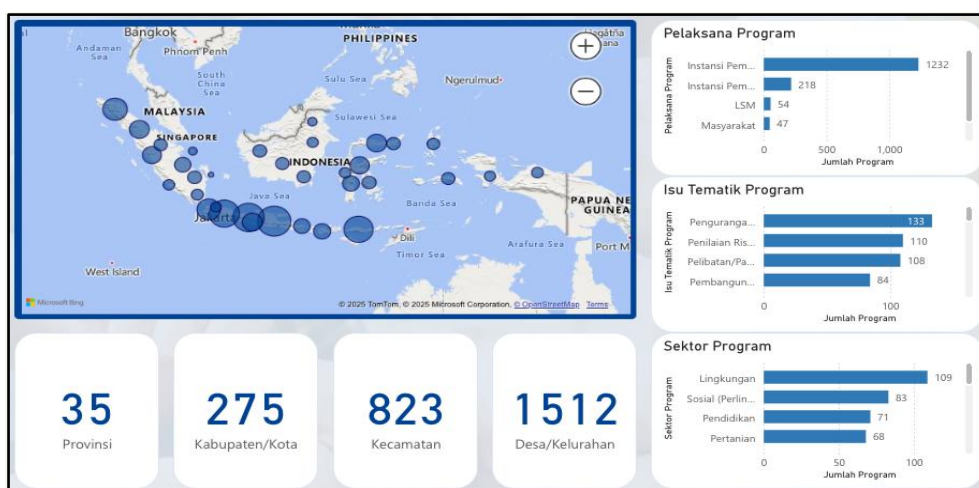
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui kajian literatur sistematis dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman konseptual yang mendalam tentang peran program Destana sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Metode kajian literatur sistematis memang lazim digunakan dalam penelitian konseptual untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu (Snyder, 2019). Sumber data penelitian ini terdiri dari dokumen kebijakan nasional yang meliputi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044, Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) 8357:2024 tentang Desa Tangguh Bencana. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan selama periode 2015-2025, serta laporan lembaga internasional seperti IFRC (2018) dan UNDP (2025). Literatur-literatur tersebut diperoleh melalui pencarian sistematis di berbagai basis data ilmiah termasuk Garuda Ristekbrin, Google Scholar, dan jurnal internasional bereputasi, dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti "desa tangguh bencana," "pemberdayaan masyarakat," "kesiapsiagaan bencana," "ketangguhan komunitas," dan "pengurangan risiko bencana Indonesia."

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi tematik untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama, yaitu pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan komunitas, kebijakan dan standar ketangguhan, serta implementasi Destana. Analisis isi memang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengolah data tekstual secara sistematis (Vaismoradi dkk., 2013). Validitas penelitian diperkuat melalui pemilihan sumber yang kredibel dan triangulasi antara dokumen kebijakan, artikel ilmiah, dan laporan internasional. Artikel ilmiah dan dokumen kebijakan yang terpilih kemudian dianalisis untuk memetakan fokus kajian tentang program Destana. Publikasi-publikasi tersebut dikelompokkan berdasarkan tema utama yang muncul, yaitu: (1) kebijakan nasional dan kerangka regulasi; (2) pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan komunitas; dan (3) praktik kelembagaan lokal. Hasil analisis kemudian disintesis untuk mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori pemberdayaan dengan standar kesiapsiagaan bencana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) merepresentasikan upaya sistematis untuk mengubah paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan reaktif ke arah pemberdayaan masyarakat yang proaktif. Berbeda dengan program bantuan bencana konvensional yang menempatkan masyarakat sebagai objek pasif, Destana justru memosisikan komunitas sebagai aktor utama dalam pengelolaan risiko. Transformasi ini berlangsung melalui tiga dimensi yang saling terkait: penguatan kapasitas pengambilan keputusan komunitas, pengembangan kompetensi teknis kesiapsiagaan, dan pelembagaan sistem tanggap darurat lokal.



Gambar 1. Peta Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (Destana) Berdasarkan Pelaksana, Isu Tematik, dan Sektor Program

(Sumber: <https://katalogketangguhan.bnpb.go.id/destana/peta-prbbk/>)

Gambar 1 memperlihatkan sebaran dan karakteristik pelaksanaan Program Destana di berbagai wilayah Indonesia. Hingga saat ini, program telah menjangkau 35 provinsi, 275 kabupaten/kota, 823 kecamatan, dan 1.512 desa atau kelurahan. Dari sisi pelaksana, kegiatan program paling banyak dilakukan oleh instansi pemerintah pusat dengan jumlah 1.232 kegiatan. Selain itu, terdapat 218 kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, 54 kegiatan oleh LSM, serta 47 kegiatan yang digerakkan langsung oleh masyarakat. Jika dilihat dari isu tematik, sebagian besar program berfokus pada pengurangan risiko bencana sebanyak 133 kegiatan, diikuti penilaian risiko (110 kegiatan), pelibatan masyarakat (108 kegiatan), dan pembangunan ketangguhan (84 kegiatan). Dari sisi sektor, program paling banyak menyasar lingkungan (109 kegiatan), kemudian sektor sosial dan perlindungan (83 kegiatan), pendidikan (71 kegiatan), serta pertanian (68 kegiatan). Peta sebaran memperlihatkan konsentrasi kegiatan cukup tinggi di wilayah Jawa dan Sulawesi, namun juga tersebar ke berbagai daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Gambaran ini menunjukkan bahwa upaya membangun ketangguhan masyarakat melalui Destana telah dilakukan secara luas, dengan dukungan berbagai pihak dan fokus yang cukup beragam, terutama pada aspek pengurangan risiko dan pelibatan aktif masyarakat.

Dari analisis terhadap dokumen kebijakan dan laporan implementasi, terungkap bahwa Destana beroperasi melalui enam dimensi kunci yang membentuk fondasi pemberdayaan masyarakat yang terstruktur. Keenam dimensi ini adalah: (1) penguatan kelembagaan melalui pembentukan forum penanggulangan risiko bencana desa; (2) perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam penilaian risiko dan penyusunan rencana kontingensi; (3) peningkatan pengetahuan risiko melalui pelatihan dan sosialisasi; (4) pengembangan sistem

peringatan dini yang memanfaatkan sumber daya lokal; (5) mobilisasi sumber daya baik manusia, finansial, maupun material; dan (6) kolaborasi multipihak yang mengintegrasikan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Tabel 1. Enam Dimensi Kerangka Pemberdayaan Masyarakat dalam Destana

No	Dimensi	Deskripsi Kegiatan
1	Penguatan Kelembagaan	Pembentukan Forum PRB Desa sebagai struktur permanen pengelolaan bencana
2	Perencanaan Partisipatif	Pemetaan risiko dan penyusunan rencana kontingensi berbasis partisipasi masyarakat
3	Peningkatan Pengetahuan Risiko	Pelatihan, simulasi, dan kampanye untuk meningkatkan literasi bencana masyarakat
4	Sistem Peringatan Dini	Instalasi dan pengelolaan sistem peringatan berbasis komunitas lokal
5	Mobilisasi Sumber Daya	Koordinasi sumber daya manusia, finansial, dan material untuk kebencanaan
6	Kolaborasi Multipihak	Kemitraan pemerintah, LSM, swasta, dan masyarakat untuk ketangguhan berkelanjutan

Diolah oleh penulis berdasarkan dokumen kebijakan dan literatur

Integrasi Kebijakan Nasional dengan Implementasi Lokal

Destana berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengintegrasikan kebijakan nasional dan standar ketangguhan ke tingkat lokal. Dalam konteks ini, Destana menjadi saluran implementasi berbagai regulasi termasuk UU 24 Tahun 2007, Perpres 87 Tahun 2020 tentang RIPB 2020-2044, dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8357:2024 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Standar ini menyediakan kerangka penilaian yang jelas terkait aspek kelembagaan, partisipasi, pengetahuan risiko, dan sistem peringatan dini yang harus dipenuhi oleh desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa SNI 8357:2024 menetapkan enam parameter ketangguhan, yaitu: (1) legislasi dan kebijakan desa; (2) perencanaan penanggulangan bencana berbasis risiko; (3) kelembagaan desa tangguh bencana; (4) pembiayaan dan peningkatan kapasitas; (5) penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan (6) monitoring dan evaluasi. Parameter-parameter ini menerjemahkan konsep ketangguhan yang abstrak menjadi kriteria operasional yang terukur, sehingga memungkinkan penilaian sistematis terhadap tingkat kesiapsiagaan desa. Djalante dkk. (2017) mencatat bahwa integrasi kebijakan nasional dengan mekanisme lokal melalui Destana dapat memperkuat tata kelola bencana secara berjenjang, terutama jika didukung oleh mekanisme pembinaan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Kehadiran SNI 8357:2024 merupakan langkah penting dalam menerjemahkan kerangka konseptual pengurangan risiko bencana ke dalam kriteria operasional yang terukur. Namun, masih terdapat kesenjangan implementasi antara standar nasional dengan kapasitas lokal, terutama di desa-desa dengan sumber daya terbatas.

Peran Kelembagaan Sosial Lokal

Kelembagaan sosial lokal memainkan peran strategis sebagai infrastruktur sosial ketangguhan. Organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, PKK, kelompok tani, lembaga keagamaan, dan relawan lokal sering menjadi aktor utama dalam diseminasi informasi, mobilisasi sumber daya, mediasi antara pemerintah dan masyarakat, serta penjaga kontinuitas program. Kusumasari dan Alam (2012) menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola bencana di tingkat lokal sangat bergantung pada kolaborasi antara lembaga lokal dengan pemerintah. Gaillard dan Mercer (2012) menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan lokal dan sistem kelembagaan modern untuk menciptakan ketangguhan yang berkelanjutan. Dalam konteks Destana, kelembagaan sosial lokal tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan

kesiapsiagaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dalam membangun budaya sadar bencana. Lembaga-lembaga ini memiliki pemahaman mendalam tentang konteks lokal, jaringan sosial yang kuat, dan kepercayaan masyarakat, sehingga menjadi saluran efektif untuk implementasi program pengurangan risiko bencana. Keterlibatan mereka memastikan kesesuaian budaya dan keberlanjutan intervensi.

Pembahasan

Tantangan dalam Implementasi Destana

Meskipun memiliki kerangka kerja yang terstruktur, pengembangan Destana secara nasional masih menghadapi beberapa tantangan struktural dan implementatif. Analisis terhadap laporan implementasi dan literatur akademik mengidentifikasi tiga kategori tantangan utama: keberlanjutan kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan mekanisme monitoring. Pertama, keberlanjutan program seringkali bergantung pada komitmen politik pemimpin lokal. Pergantian kepala daerah atau kepala desa sering kali diikuti oleh perubahan prioritas pembangunan yang berdampak pada alokasi anggaran dan dukungan politik terhadap program pengurangan risiko bencana. Situasi ini menyebabkan fluktuasi dalam implementasi Destana, di mana desa yang sebelumnya aktif dapat mengalami stagnasi ketika kepemimpinan baru tidak menempatkan isu kebencanaan sebagai prioritas. Solusi jangka panjang memerlukan pelembagaan Destana melalui Peraturan Desa (Perdes) sehingga program memiliki landasan hukum yang tidak mudah terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan.

Kedua, tantangan regenerasi dan retensi sumber daya manusia masih menjadi kendala. Kader dan relawan yang telah dilatih kerap mengalami penurunan keterlibatan karena berbagai faktor seperti migrasi ekonomi, perubahan pekerjaan, atau kelelahan akibat beban kerja tanpa kompensasi yang memadai. Tanpa sistem kaderisasi yang terstruktur, pengetahuan dan keterampilan yang telah dibangun dapat terdegradasi seiring waktu. Pengembangan sistem mentoring berjenjang dan mekanisme insentif yang jelas diperlukan untuk menjaga kontinuitas kapasitas komunitas. Ketiga, mekanisme monitoring dan evaluasi masih belum terintegrasi secara sistematis ke dalam sistem penilaian nasional. Banyak desa yang melaksanakan kegiatan Destana tanpa pengukuran kinerja yang sistematis, sehingga sulit mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang memerlukan perbaikan. Penguatan sistem monitoring dengan indikator yang jelas dan mekanisme pelaporan berkala sangat penting untuk efektivitas program.

Peluang Strategis untuk Memperkuat Destana

Di tengah berbagai tantangan, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi Destana. Pertama, integrasi Destana ke dalam perencanaan pembangunan desa (RPJMDes dan RKPDes) dapat memastikan alokasi anggaran yang berkelanjutan dan kontinuitas program terlepas dari perubahan kepemimpinan. Integrasi ini memosisikan pengurangan risiko bencana bukan sebagai program terpisah, melainkan sebagai komponen integral pembangunan. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas kesiapsiagaan. Aplikasi mobile untuk peringatan bencana, platform pelatihan online, dan alat pemetaan risiko digital dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kecepatan respons. Adopsi teknologi harus mempertimbangkan kapasitas lokal dan ketersediaan infrastruktur untuk memastikan aksesibilitas. Strategi komunikasi publik yang efektif menjadi elemen penting dalam penguatan kapasitas masyarakat dalam program Desa Tangguh Bencana.

Sejalan dengan temuan Susdarwono dan Surahmadi (2022), efektivitas berbagai media komunikasi dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap program vaksinasi menunjukkan bahwa pendekatan multi-saluran dapat meningkatkan jangkauan dan

penerimaan pesan di tingkat komunitas. Prinsip serupa dapat diterapkan dalam sosialisasi kesiapsiagaan bencana, di mana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta pemanfaatan berbagai media lokal dan sosial, menjadi kunci dalam membangun ketangguhan desa secara menyeluruh. Ketiga, pengembangan jejaring multipihak dapat mendiversifikasi sumber daya dan memperkuat keberlanjutan program. Kemitraan dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi internasional dapat menyediakan keahlian teknis, pendanaan, dan inovasi yang mendukung implementasi Destana. IFRC (2018) dan UNDP (2025) menunjukkan bahwa inisiatif pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang berhasil umumnya ditandai oleh keberlanjutan kelembagaan lokal, dukungan kebijakan lintas sektor, dan sistem evaluasi yang adaptif terhadap konteks lokal.

Kerangka Konseptual: Model Pemberdayaan Masyarakat Destana

Berdasarkan sintesis analisis, penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori pemberdayaan masyarakat dengan standar kesiapsiagaan bencana dalam konteks Destana. Kerangka ini menggambarkan hubungan dinamis antara tingkat kebijakan nasional, tingkat implementasi operasional, dan hasil di tingkat komunitas, yang dimediasi oleh enam dimensi pemberdayaan kunci yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kerangka ini menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam konteks bencana memerlukan: (1) lingkungan kebijakan yang mendukung dengan menyediakan fondasi legal dan kelembagaan; (2) alokasi sumber daya yang memadai termasuk finansial, manusia, dan teknis; (3) proses partisipatif yang memastikan kepemilikan masyarakat dan kesesuaian budaya; (4) pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan transfer pengetahuan berkelanjutan; (5) mekanisme kelembagaan yang memastikan keberlanjutan melampaui siklus proyek; dan (6) sistem monitoring yang memungkinkan manajemen adaptif dan pembelajaran. Kerangka terintegrasi ini mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada dengan secara eksplisit mengaitkan kebijakan tingkat makro dengan praktik komunitas tingkat mikro, mengidentifikasi faktor-faktor mediasi kritis, dan mengusulkan jalur operasional untuk menerjemahkan prinsip-prinsip pemberdayaan menjadi hasil kesiapsiagaan bencana. Kerangka ini dapat berfungsi sebagai alat analitis bagi pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program ketangguhan bencana berbasis komunitas.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan muncul untuk memperkuat Destana sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Pertama, perlu ditetapkan mandat legal melalui Peraturan Desa yang mewajibkan integrasi Destana ke dalam rencana pembangunan desa, untuk memastikan keberlanjutan kelembagaan melampaui transisi kepemimpinan. Kedua, mengembangkan sistem sertifikasi nasional untuk kader Destana dengan mekanisme insentif termasuk pengakuan, peluang pelatihan, dan potensi integrasi ke dalam aparatur desa. Ketiga, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi dengan indikator terstandar, platform digital untuk pengumpulan data, dan penilaian kinerja berkala. Keempat, meningkatkan alokasi anggaran melalui earmarking anggaran penanggulangan bencana dalam dana desa dan pembentukan dana kontingensi bencana di tingkat desa. Kelima, mendorong kemitraan multipihak melalui kerangka kolaborasi formal yang melibatkan perguruan tinggi, sektor swasta, LSM, dan organisasi internasional. Keenam, meningkatkan integrasi pengetahuan lokal dan teknologi modern dalam sistem peringatan dini, memastikan kesesuaian budaya dan aksesibilitas teknologi.

KESIMPULAN

Program Destana telah terbukti berperan strategis sebagai model pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dalam kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Melalui peningkatan kapasitas pengetahuan risiko, penguatan kelembagaan sosial lokal, dan perencanaan partisipatif, Destana mendorong masyarakat untuk menjadi subjek aktif dalam pengurangan risiko bencana. Penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual yang mengidentifikasi enam dimensi kunci pemberdayaan masyarakat dalam Destana: penguatan kelembagaan, perencanaan partisipatif, peningkatan pengetahuan risiko, sistem peringatan dini, mobilisasi sumber daya, dan kolaborasi multipihak. Integrasi Destana dengan kebijakan nasional dan standar ketangguhan, khususnya SNI 8357:2024, memperkuat tata kelola bencana secara berjenjang dari pusat hingga desa. Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan kebijakan nasional menjadi fondasi penting dalam membangun ketangguhan komunitas secara berkelanjutan. Namun, tantangan masih muncul dalam transisi kepemimpinan, keterbatasan sumber daya, dan mekanisme monitoring yang memerlukan perhatian melalui dukungan kebijakan yang konsisten dan kolaborasi multipihak.

Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menyediakan kerangka konseptual terintegrasi yang mengaitkan teori pemberdayaan masyarakat dengan standar kesiapsiagaan bencana dalam konteks Indonesia. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat ketangguhan desa termasuk mandat legal, sistem sertifikasi, penguatan monitoring, alokasi anggaran, kemitraan multipihak, dan integrasi teknologi. Dengan demikian, penguatan Destana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kesiapsiagaan, tetapi juga sebagai strategi pemberdayaan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana di seluruh Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia atas dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada BNPB yang dokumen kebijakan dan laporan implementasinya menjadi sumber penting dalam analisis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. BNPB. <https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/migration/pubs/34.pdf>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (n.d.). *Peta pengelolaan risiko berbasis komunitas*. Diakses 5 Oktober 2025, dari <https://katalogketangguhan.bnpb.go.id/destana/peta-prbbk/>
- Badan Standardisasi Nasional. (2024). SNI 8357:2024 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Badan Standardisasi Nasional. <https://akses-sni.bsn.go.id/viewsni/baca/10022>
- Direktorat Kesiapsiagaan BNPB. (2025, Oktober 1). Integrasi AMPD dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana [Bahan presentasi]. Kegiatan Diskusi dan Konsultasi Publik Dokumen Strategis pada Peringatan Bulan PRB, Mojokerto.
- Djalante, R., Garschagen, M., Thomalla, F., & Shaw, R. (Eds.). (2017). *Disaster risk reduction in Indonesia: Progress, challenges, and issues*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-54466-3>
- Gaillard, J. C., & Mercer, J. (2012). From knowledge to action: Bridging gaps in disaster risk reduction. *Progress in Human Geography*, 37(1), 93-114. <https://doi.org/10.1177/0309132512446717>
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2018). Road Map to

- Community Resilience: Operationalizing the Framework for Community Resilience. <https://www.ifrc.org/document/road-map-community-resilience>
- Kusumasari, B., & Alam, Q. (2012). Local wisdom-based disaster recovery model in Indonesia. *Disaster Prevention and Management*, 21(3), 351-369. <http://dx.doi.org/10.1108/09653561211234525>
- Oktari, R. S., & Kumala, I. D. (2020). Improving student internalization of disaster knowledge by participating in learning package development. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 6(3), 195-202. <http://doi.org/10.22146/jpkm.51558>
- Oktari, R. S., Shiwaku, K., Munadi, K., Syamsidik, & Shaw, R. (2018). Enhancing community resilience towards disaster: The contributing factors of school-community collaborative network in the tsunami affected area in Aceh. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 29, 3-12. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.07.009>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020.
- Pratiwi, D., & Meirinawati, M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam program Desa Tangguh Bencana di Jawa Timur. *Journal Publika*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/29557/27080>
- Salman, F. F. (2023, Agustus 16). Evaluasi pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana Desa Akar-Akar Kabupaten Lombok Utara tahun 2023. Seminar Nasional Paedagoria, Universitas Muhammadiyah Mataram, 3. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/fkip/article/view/16681/pdf>
- Shaw, R. (Ed.). (2014). Community practices for disaster risk reduction in Japan. In *Disaster risk reduction: Methods, approaches and practices*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-4-431-54246-5>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Susdarwono, E. T., & Surahmadi. (2022). The effectiveness of promotional tools in making Covid-19 vaccination a success: Hypothesis testing methods for changing Cochran's version. *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 22-30. <https://doi.org/10.57235/qistina.v1i1.14>
- Twigg, J. (2015). Disaster Risk Reduction. Overseas Development Institute (ODI). <https://www.preventionweb.net/publication/disaster-risk-reduction>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007.
- United Nations Development Programme. (2025). Community-based resilience-building: A UNDP guidance note. <https://www.undp.org/publications/community-based-resilience-building-undp-guidance-note>
- Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. *Nursing & Health Sciences*, 15(3), 398-405. <https://doi.org/10.1111/nhs.12048>
- Wahyunengseh, R. D., & Pamungkas, D. B. (2025). Disaster-resilient village governance: A public administration perspective on social-ecological resilience. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(4), 887-895. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/download/66750/pdf>